



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAH DWI UTAMI
2. Jabatan : TENAGA PENGKAJI BIDANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
3. NHK : 115079

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.233.355.000**

1. Tanah Seluas 160 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m²/48 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 388.256.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/50 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 415.375.000
5. Tanah Seluas 1.375 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.629.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 850.724.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 401.000.000**

1. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000



3. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO LX 150 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 116.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 10.746.874

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.492.804.695

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.253.906.569

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.253.906.569

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.